

Tiga Kementerian Belum Keluarkan Izin, Akmal Malik Bertemu Kemenko Perekonomian Bahas KEK Maloy



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,21/02/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Pj Gubernur Akmal Malik telah bertemu pihak Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal ini guna memastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Sesmenko Bidang Perekonomian, yang juga Plt Sekjen Dewan Nasional KEK ditemui Akmal Malik didampingi jajaran Pemprov Kaltim terkait serta pihak Perusda.

Apresiasi kepada Menko Perekonomian yang terus memberikan dukungan, sehingga KEK Maloy terus berkembang sejak 2011 disampaikan Akmal Malik. KEK Maloy sendiri diresmikan pada 2014 dan masuk program *Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. “*Alhamdulillah* kementerian memahami kesulitan kita,” kata Akmal Malik, Selasa (20/2).

Menurutnya, Pemerintah Daerah dan Perusda MBS yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengoperasikan KEK Maloy. Memang persoalannya adalah perizinan yang belum beres dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK, dan Kementerian Perhubungan.

Karena itu, Akmal Malik mengungkapkan Kementerian akan melakukan evaluasi pada April, kemudian berlanjut pada Juni. Di mana Pemerintah Daerah dan Perusda diminta segera memprogres kemajuan dan capaian KEK Maloy.

Khususnya minat investor yang akan masuk berinvestasi. Sebab jika investor bertambah, maka peluang KEK Maloy semakin besar dan nilainya akan bertambah. “Kuncinya, kita harus mampu mendatangkan investor. Kan diukur skornya,” tukasnya. Misalnya, berapa progres yang sudah dilakukan pengelola KEK MBTK dalam

mendatangkan investor. Keberadaan KEK Maloy memang untuk menarik minat orang atau investor agar mau berinvestasi di daerah.

Kelemahan Kaltim, kesulitan mendatangkan investor sebab kendala yang dihadapi. “Kita harus progresif segala upaya dilakukan dan menarik minat siapa saja investor yang akan datang,” tandasnya. Salah satu langkah strategis, Akmal Malik meminta para pihak segera berkomunikasi agar mampu mendatangkan investor.

Sehingga progres investasi naik dan infrastruktur otomatis akan berkembang dengan baik. “Bagaimana upaya kita agar KEK Maloy tidak dicabut. Yakni mendatangkan investor sebanyak-banyaknya,” tegasnya.

“Ini menjadi tanggung jawab semua dan peran *stakeholders* terkait, baik Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama Perusda MBS selaku pengelola KEK Maloy,” sambungnya.

Sementara itu, beberapa sarana yang telah ditinjau awal Februari 2024 lalu oleh Akmal Malik juga telah rampung. Seperti pengolahan air bersih yang telah beroperasi di kawasan KEK Maloy, garapan Dinas PUPR-Pera Kaltim. Sekitar Rp20 miliar anggaran digelontorkan untuk pembangunan IPA Maloy tersebut, guna menunjang fasilitas kawasan KEK.

“Sudah berfungsi (IPA) untuk air bersihnya. Kalau kita menunggu, sementara yang kita fungsikan itu dulu sembari menunggu investor masuk,” tegas Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firmanda.

Pihaknya juga membantu dalam pembukaan lahan *tenant* yang akan dipergunakan para investor.

Untuk itu, selama belum masuknya investor, pihak Dinas PUPR-Pera Kaltim menunggu, sembari mengerjakan beberapa infrastruktur penunjangnya. “Lalu nantinya apa lagi untuk maksimalkan kawasan, kita tunggu untuk membantu. Termasuk pembukaan lahan (kawasan *tenant* investor),” tegas Nanda, sapaan akrabnya. **(uws)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tiga Kementerian Belum Keluarkan Izin, Akmal Malik Bertemu Kemenko Perekonomian Bahas KEK Maloy, 21/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (PP 85/2014), Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 85/2014, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas:
 - a. Zona industri;
 - b. Zona logistik; dan
 - c. Zona pengolahan ekspor.